

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Penetapan Harga

1. Pengertian Perjanjian Penetapan Harga

Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjual “bebas” menetapkan sendiri harga penjualannya.¹²

Penetapan harga (*price fixing*) adalah suatu istilah yang biasanya diterapkan pada berbagai tindakan yang diambil oleh para pesaing yang memiliki pengaruh langsung atas harga. Bentuk yang paling sederhana adalah suatu kesepakatan mengenai harga atas harga-harga yang dibebankan kepada sebagian atau semua pelanggan. Jika para pelanggan tidak mempunyai alternatif untuk produk yang dikartelkan dan tidak dapat dengan mudah mengurangi konsumsi mereka, maka kenaikan harga dapat menjadi sangat besar. Paling tidak, kartel pada umumnya akan menetapkan harga di atas harga produsen terkecil efisiensinya di pasar.¹³

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian penetapan harga adalah perjanjian diantara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga, guna membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Perjanjian penetapan harga dibentuk oleh sekelompok

¹² Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.* Hal. 85

¹³ R.S. Khemani, dkk. 1999, *Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Persaingan*, Washington D.C. dan Paris, Bank Dunia dan OECD, Hal. 27

perusahaan atau pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk bertindak secara kolektif dalam suatu monopoli.¹⁴

Penetapan harga dengan mudah dapat dilakukan di pasar tertentu dibandingkan dengan praktek-praktek lain, namun demikian sangat dimungkinkan bahwa penetapan harga tersebut tidak dapat berjalan sama sekali di pasar yang lain. Hal ini penting untuk diketahui, karena perjanjian tersebut biasanya merupakan perjanjian yang terselubung (*clandestine*) dan seringkali sangat sulit untuk dideteksi. Dibutuhkan naluri ekonomi yang baik guna menciptakan penegakan hukum di pasar terkait yang paling kondusif bagi terjadinya penetapan harga.¹⁵

UU No.5 Tahun 1999 melarang perjanjian antarprodusen di mana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar. Karenanya, penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

¹⁴ *Price fixing agreement is an agreement between sellers to raise or fix prices in order to restrict inter-firm competition and earn higher profit. Price fixing agreements are formed by firm in an attempt to collectively behave as a monopoly.* Lihat: RS Khemani and DM Shapiro, 1996, *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, Paris, EOC, Hal. 44

¹⁵ A.M. Tri Aggraini, 2003, *Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal.306

Melihat rumusan pasal 5 Ayat (1) UU Antimonopoli tersebut berarti larangan ini bersifat *per se illegal* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 disebabkan penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya.¹⁶ Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, berarti pelaku usaha tersebut berada pasar bersangkutan faktual yang sama baik secara vertikal maupun horizontal. Perjanjian yang dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan.¹⁷

Salah satu perwujudan dari praktek bisnis oligopoli adalah melakukan penetapan harga atau *price fixing* oleh sekelompok pelaku usaha secara bersama-sama yang bertujuan untuk meniadakan persaingan di antara sesama mereka. Adapun akibat dari perbuatan *price fixing* tersebut dapat berdampak buruk dalam dunia usaha karena tidak hanya merugikan para pesaing lainnya, tetapi juga konsumen. “*There can be no worse example of anti-competitive behavior than where ‘competitors’ agree to fix the illegal.*”¹⁸

¹⁶ “Pesaingnya” berarti pelaku usaha juga. Pesaing di sini pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, jadi bukan pembeli. Untuk melihat definisi pembeli lihat Pasal 1 angka 15.

¹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *OP.cit.* Hal. 84-85

¹⁸ Brendan Pentony, *et.al*, 1995, *Understanding Business Law*, Butterworths, Sydney, Hal. 199.

Perjanjian *price fixing* dapat berupa:

a. *Horizontal Price Fixing*

Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antar-sesama pelaku usaha yang selevel seperti produsen (produsen dengan produsen) terhadap produk barang jasa yang sama yang diberlakukan pada dasar bersangkutan (*relevant market*) yang sama.

b. *Vertikal Price Fixing*

Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antara pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara produsen dan distributor (*wholeseller*) atau dengan pengecer (*retailer*). Akibat dan tujuan diadakannya *vertikal price fixing* oleh produsen ini adalah mengurangi atau meniadakan persaingan antara sesama pengecer atau meniadakan persaingan antarsesama distributor.¹⁹

Penetapan harga (*price fixing*) yang terjadi secara vertikal maupun horizontal dianggap sebagai perdagangan (*restraint of trade*), yang membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (*price competition*). Dengan kata lain, apabila *price fixing* dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang.

Penetapan harga horizontal (*horizontal price fixing*), terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama, dengan demikian satu perusahaan dengan lainnya merupakan pesaing, menentukan harga jual produk mereka dalam tingkat yang sama.

¹⁹ Elyta Ras Ginting, *Op.cit.* Hal. 35

Penetapan harga vertikal (*vertikal price fixing*), terjadi apabila suatu perusahaan yang berada dalam tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah.²⁰

Selain kesepakatan yang sederhana mengenai harga yang akan dibebankan terdapat bentuk penetapan harga lainnya, yaitu kesepakatan kenaikan harga, kesepakatan rumus standart atas dasar mana harga-harga harus dihitung, kesepakatan untuk memelihara rasio yang diterapkan antara harga-harga produk yang bersaing namun tidak identik, kesepakatan untuk menghapuskan potongan harga atau menetapkan potongan seragam, kesepakatan jangka waktu kredit yang dapat diperpanjang bagi pelanggan, kesepakatan untuk menghilangkan produk-produk yang ditawarkan dengan harga rendah dari pasaran untuk membatasi penawaran dan menjaga agar harga tetap tinggi, kesepakatan untuk tidak menurunkan harga tanpa memberitahukan anggota kartel yang lain, kesepakatan untuk tunduk kepada harga-harga yang telah diumumkan, kesepakatan untuk tidak menjual kecuali syarat-syarat harga yang telah disepakati dipenuhi, kesepakatan untuk menggunakan harga yang seragam sebagai titik awal negoisasi.²¹

²⁰ Tresna P. Soemardi, 2002, *Kartel Internasional: Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional*, Jurnal KPPU Edisi 2, Tahun Jurnal KPPU RI, Jakarta, Hal. 49.

²¹ R.S. Khemani, dkk, *Op.cit.*, Hal. 27.

2. Rasionalitas Pelarangan Perjanjian Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat.

Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan meningkat (*welfare improvement*). Namun ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar.

Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.²²

²² Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU Republik Indonesia, Jakarta, Hal. 12

3. Aturan Pelarangan Penetapan Harga

a. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

Dalam ayat 1 Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pernyataan tersebut:

a. Perjanjian Penetapan Harga

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, penetapan harga merupakan salah satu bentuk **kesepakatan** dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu **perjanjian**. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

b. Antar Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya

Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close*

substitute) dari perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terjadi perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama.

c. Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-perusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar akan sama.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) :

- a) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
- b) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;

- c) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
- d) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
- e) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- f) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi;
- g) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- h) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- i) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal negosiasi;²³

b. Pasal 5 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

Ayat (2) pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku.

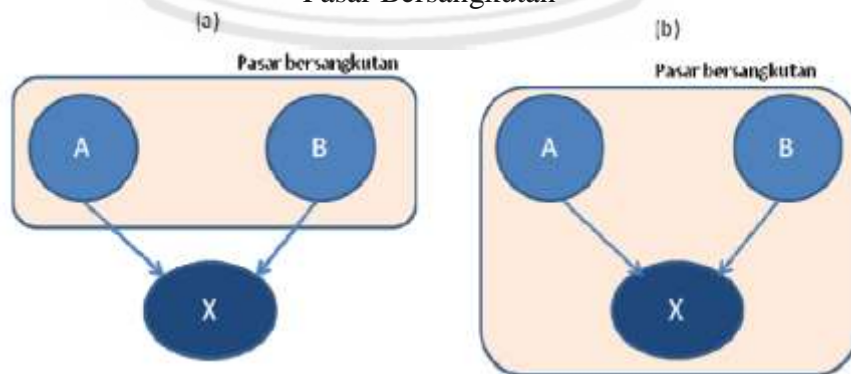
Usaha patungan atau *joint venture* merupakan suatu entitas yang dibentuk oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama dimana para pihak bersepakat untuk

²³ Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU Republik Indonesia, *Ibid.* 13-14

membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proposional berdasarkan perjanjian tersebut.usaha patungan dapat bersifat sementara atau juga berkelanjutan.

Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha induknya (pihak yang melakukan kesepakatan). Dengan demikian harga dan kuantitas dari usaha patungan bersifat independen dari harga dan kuantitas usaha induknya. Oleh karena itu, penetapan harga yang terjadi di dalam usaha patungan menunjukkan harga dari usaha patungan tersebut dan tidak serta merta menunjukkan harga dari unit usaha induknya. Hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan karena tidak (secara langsung) menghilangkan persaingan diantara kedua perusahaan induknya. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dua jenis usaha patungan, yaitu (a) dimana usaha patungan berada pada pasar bersangkutan yang berbeda dengan induknya, dan (b) dimana usaha patungan berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan induknya.

Gambar 1
Pasar Bersangkutan



Sumber: Pedoman Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 No. 4 tahun 2011 Halaman 15

Keterangan:

A, B : Pelaku usaha yang bersaing

X : Usaha patungan

→ : penyertaan di dalam usaha patungan

Apapun jenis usaha patungannya (baik A maupun B), keputusan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan patungan X merupakan keputusan satu entitas bisnis tersendiri, dan tidak dapat diberlakukan sebagai perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha A dan B. Namun bukan berarti pengecualian usaha patungan dari hukum persaingan bersifat mutlak. Meskipun harga perusahaan X bukan merupakan perjanjian penetapan harga antara perusahaan A dan B, namun usaha patungan dapat dijadikan sarana (*facilitating device*) bagi perusahaan A dan B untuk melakukan koordinasi.²⁴

4. Praktek-Praktek Yang Dikategorikan Sebagai Penetapan Harga

a. Penetapan harga antarpelaku usaha

Penetapan harga (*price fixing*) antarpelaku usaha dilarang oleh Pasal 5 dari Undang-Undang Anti Monopoli. Sebab, penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Akan tetapi undang-undang memberikan perkecualian terhadap larangan membuat perjanjian tentang penetapan harga

²⁴ Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU Republik Indonesia, *Ibid.* 15-16

antarpelaku usaha ini, yaitu jika perjanjian penetapan harga tersebut dibuat dalam hal:

- 1) Dalam suatu usaha patungan, atau
- 2) Didasarkan pada undang-undang yang berlaku (Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli

b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama

Pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama dilarang oleh Pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, dengan jalan memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang/jasa yang sama.

Tentu saja tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti monopoli. Sebab, jika *cost* yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya berbeda, maka harga secara logis tentu akan berbeda pula. Karena itu secara teknis, diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum anti monopoli manakala perbedaan harga terhadap konsumen satu dengan konsumen yang lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* yang dikeluarkan oleh pihak penjual tersebut. Singkatnya, dalam melarang suatu diskriminasi harga, hukum anti monopoli harus secara bijak mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Kesamaan *marginal cost*
- b) Kesamaan kualitas dan kuantitas barang yang dijual
- c) Kesamaan *cost* untuk memproduksi, menjual dan *delivery*.
- d) Tidak ada perubahan harga karena perubahan atau perbedaan waktu
- e) *Marketability* dari barang tersebut harus sama
- f) Komponen harga yang berbeda, termasuk juga jika ada *allowance*, bonus, atau kemudahan/jasa dari penjual yang diberikan berbeda-beda kepada satu pembeli dengan pembeli yang lain.

Dalam teori ilmu hukum anti monopoli dikenal beberapa macam diskriminasi harga yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

a) Diskriminasi harga primer

Yang dimaksud diskriminasi harga primer (*primary line*) adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya.

b) Diskriminasi harga sekunder

Diskriminasi harga sekunder (*secondary line*) adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku yang dapat mempunyai akibat negatif terhadap para konsumen dari pelaku usaha pesaingnya.

c) Diskriminasi harga umum

Diskriminasi harga umum adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha tanpa melihat kepada letak geografisnya.

d) Diskriminasi harga geografis

Sementara yang dimaksud dengan diskriminasi harga secara geografis adalah suatu diskriminasi harga di mana harga dibedakan menurut letak geografisnya.

e) Diskriminasi harga tingkat pertama

Diskriminasi harga tingkat pertama (*first degree price discrimination*) sering disebut juga dengan diskriminasi harga sempurna (*perfect price discrimination*). Dalam hal ini perbedaan harga dari satu pembeli dengan pembeli lainnya sangat jauh. Pihak pembeli yang membayar harga lebih mahal oleh penjual diberikan harga yang paling mahal yang bisa diberikan kepadanya.

f) Diskriminasi harga tingkat kedua

Diskriminasi harga tingkat kedua (*secondary price discrimination*) sering disebut juga dengan diskriminasi harga tidak sempurna (*imperfect price discrimination*). Yang dimaksud dengan diskriminasi harga tingkat kedua ini adalah suatu diskriminasi harga di mana pihak pembeli yang membeli pada tingkat harga yang lebih mahal, tetapi bukan pada tingkat harga termahal yang mungkin diberikan, atau bukan kelompok pembeli yang mau membeli barang tersebut pada tingkat harga termahal. Jadi dalam hal ini, pihak penjual dalam menjual kepada pembeli tadi tidak/tidak mungkin melakukan segregasi pasar secara sempurna.

g) Diskriminasi harga secara langsung

Diskriminasi harga secara langsung (*direct*) adalah suatu diskriminasi harga yang diberikan oleh seorang penjual kepada

para pembeli di mana kelihatan dari harganya secara nominal berbeda terhadap satu pembeli dengan pembeli lainnya.

h) Diskriminasi harga secara tidak langsung

Diskriminasi harga secara tidak langsung adalah suatu diskriminasi harga kepada para pembeli di mana harga nominalnya tetap sama. Misalnya pembeli yang satu dengan pembeli yang lain tetap membeli pada harga Rp 1.000.000,- perkilogram. Tetapi ada kemudahan tertentu atau tambahan servis tertentu yang diberikan hanya kepada pembeli tertentu secara diskriminatif. Akhirnya, jika dihitung harga akhir yang harus dibayar oleh masing-masing pembeli, satu sama lain akan berbeda.

c. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain

Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain dilarang oleh Pasal 7 dari Undang-Undang Anti Monopoli. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Larang pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah harga pasar atau yang dikenal dengan istilah "*anti dumping*" ini dimaksudkan agar pihak pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang/jasanya sesuai dengan harga pasar.

Di samping itu, apabila perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pihak yang kurang kuat modalnya tentu tidak sanggup menyainginya, karena harga tidak

mungkin dilakukan. Biasanya pada gilirannya nanti, apabila pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi persaingan. Dan, hal ini akan sangat merugikan pihak konsumen.

d. Penetapan harga jual kembali

Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Anti Monopoli. Yang dimaksudkan adalah bahwa seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bahwa pihak pembeli barang/jasa tersebut tidak akan menjual atau memasok barang/jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Sebab mestinya, pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang/jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar.²⁵

5. Dampak Negatif Penetapan Harga

Beberapa kerugian yang terjadi ketika pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga adalah: pertama, harga yang dibayar oleh konsumen lebih tinggi dibandingkan harga pada saat pelaku usaha bersaing secara kompetitif. Kedua, pelaku usaha berpotensi untuk mengurangi jumlah *output* yang dapat menimbulkan kelangkaan. Ketiga, terjadi kerugian konsumen (*consumer loss*), karena pelaku *price fixing* mendapat keuntungan lebih besar dengan mengeksploitasi surplus konsumen. Keempat, terdapat total kerugian yang hilang (*dead weight loss*) dari jumlah surplus konsumen dan surplus produsen.²⁶

²⁵ Munir Fuady, *Op.cit.* Hal. 56-60

²⁶ Michael K. Vaska, *Conscious Parallelism and Price Fixing: Defining The Boundary*”, University of Chicago Law Review, Vol. 52, 1985, Page 508

Penetapan harga dilarang karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap persaingan harga (*price competition*). Adanya penetapan harga mengakibatkan kebebasan menentukan harga secara independen menjadi berkurang. Selain merugikan persaingan, tindakan penetapan harga juga merugikan konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang tersedia akan semakin sedikit. Para ekonom dan praktisi hukum persaingan usaha menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga memiliki akibat yang fatal bagi persaingan dengan menaikkan harga di atas harga kompetitif dan sering disebut dengan “*naked agreement to eliminate competition*”.²⁷

6. Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Penetapan Harga

Dalam mengungkap adanya pelanggaran dalam persaingan usaha, KPPU selaku penegak hukum di bidang ini memiliki pendekatan yang mendukung alasannya atas dugaan pelanggaran yaitu *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal*.

Kedua pendekatan ini pertama kali tercantum dalam *Sherman Act 1890* (UU Antimonopoli Amerika Serikat), pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1899 (untuk *per se illegal*) dan pada tahun 1911 (untuk *rule of reason*) dalam putusan atas beberapa kasus *antitrust*/persaingan usaha. Sebagai *pioneer* dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di Amerika Serikat juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (*customary practice*) dalam bidang persaingan usaha.²⁸

²⁷ Susanti Adi Nugroho, 2001, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pulitbang Mahkamah Agung, Jakarta, Hal. 34-35

²⁸ Pentingnya prinsip “*Per Se*” dan “*Rule of Reason*” di UU Persaingan usaha, URL: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>, Diakses pada 24 Januari 2018

a. Prinsip *Per se Illegal*

Prinsip *Per se Illegal* merupakan prinsip yang menekankan pada kemudahan dan sifatnya sederhana dalam arti apabila terdapat dugaan pelaku usaha melanggar hukum persaingan, maka peraturan perundang-undangan langsung diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan melihat apakah tindakan pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat terhadap perundang-undangan daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Hal tersebut terjadi pada prinsip ini karena ketika terjadi suatu pelanggaran pada undang-undang, hakim cukup menilai apakah tindakan pelaku usaha tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak, sehingga prinsip ini dianggap relatif mudah dan sederhana.²⁹ Penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “... yang dapat mengakibatkan..”.

Per se illegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum karena prinsip ini menekankan adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Pendekatan ini juga menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ialah ilegal, tanpa harus

²⁹ Andi Fahmi Lubis et. al., *Op. Cit.*, Hal. 61

dilakukan pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Namun demikian, tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian, terutama jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

b. Prinsip *Rule of Reason*

Pendekatan *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha. Pendekatan ini merupakan kebalikan dan lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan pendekatan *per se illegal* dan cenderung berorientasi pada efisiensi. *Rule of reason* menentukan, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan unsur undang-undang, namun jika perbuatan terdapat alasan obyektif yang dapat membenarkan perbuatan, maka perbuatan tersebut termasuk suatu pelanggaran. Penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan *Rule of reason* mempertimbangkan pula alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan/perbuatan oleh pelaku usaha.³⁰

Ciri dari pendekatan *rule of reason* yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal nya, yakni pencantuman kata-kata “.... yang dapat

³⁰ Susanti Adi Nugroho, 2001, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pulitbang Mahkamah Agung, Jakarta, Hal. 711

mengakibatkan” dan/atau “....patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

B. Tinjauan Tentang Wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Mengadili menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999

1. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.³¹

Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)³² yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)³³ yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*). Peran sebuah lembaga independen semu negara (*quasi*) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.³⁴

Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah

³¹ Andi Fakmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 311

³² Budi L. Kagramanto, 2007, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Hal. 2

³³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Hal. 24

³⁴ <http://www.rReformasihukum.org>, 6 Juli 2009

lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

KPPU diberi status sebagai pengawas UU No. 5 Tahun 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.³⁵

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

³⁵ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal.313

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitian.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Manjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima

pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.³⁶

Disamping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi KPPU adalah:

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

³⁶ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 314-315

Adanya kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting karena ketidakjelasan status KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika Komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya.³⁷

2. Pemeriksaan Oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40), terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³⁸

a. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan.

Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya. Untuk perkara atas dasar laporan nomor perkara tersebut adalah nomor perkara/KPPU-L (Laporan)/Tahun.³⁹

³⁷ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 31-314

³⁸ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 326

³⁹ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 326

b. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk perkara atas dasar inisiatif dari KPPU nomornya adalah sebagai berikut: Nomor perkara/KPPU-I (Inisiatif)/Tahun.⁴⁰

c. Jenis Pemeriksaan oleh KPPU

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan Komisi.⁴¹

⁴⁰ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 326

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 327

2. Pemeriksaan Lanjutan

Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 UU Antimonopoli menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor.” Sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi.”⁴²

d. Tahap Pemeriksaan oleh KPPU

1. Panggilan

Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, KPPU terlebih dahulu menyampaikan panggilan kepada pelaku usaha, saksi atau pihak lain untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Surat panggilan

⁴² Andi Fahmi Lubis, *et. Al. Op.cit.* Hal. 327

dari KPPU biasanya memuat tanggal, hari, jam sidang serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan.⁴³

Pelaku usaha atau saksi yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam persidangan di KPPU dapat diancam dengan tindakan tidak kooperatif yang melanggar Pasal 42 UU No. Tahun 1999, kemudian perkara diserahkan kepada kepolisian (Pasal 41 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999). Ini berarti bahwa perkara berubah menjadi perkara pidana.

2. Pemeriksaan

a. Administratif

Prosedur administratif meliputi pemeriksaan identitas dan pembacaan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, saksi atau pihak lain. Menurut Pasal 39 ayat 3, Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha apabila memang apabila informasi tersebut termasuk rahasia perusahaan. Menurut Pasal 39 ayat 5, dalam melakukan pemeriksaan, anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas. Menurut ketentuan Pasal 20 Keputusan KPPU No 5 Tahun 2000, pihak yang diperiksa tersebut berhak didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

b. Pokok permasalahan

Dalam memeriksa pokok permasalahan, terdapat dua tahap yaitu pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian kesempatan

⁴³ Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 27.

pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sifatnya searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha tidak diberikan kesempatan memberi tanggapan atas dokumen yang diperoleh KPPU atau saksi yang telah diperiksa.⁴⁴

Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca BAP pemeriksaan. Apabila diperlukan dan disetujui KPPU, pelaku usaha dapat memberikan koreksi atas BAP tersebut. Sebelum sidang ditutup, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, KPPU memberikan kesempatan pada pelaku usaha atau saksi untuk memberikan keterangan atau dokumen tambahan. Bagi pelaku usaha, keterangan atau dokumen tambahan ini berfungsi sebagai bentuk pembelaan.

c. Pembuktian

Pasal 42 UU No 5 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor/saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam perkara pemeriksaan yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa pengertian

⁴⁴ Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Ibid.* Hal. 36

ahli disini adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang praktik monopoli dan persaingan usaha, dan memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diperiksa.⁴⁵

Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya/keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang obyektif, oleh karena itu dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian khusus.⁴⁶

C. Tinjauan Tentang Alat Bukti

Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1886 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari: (a)Bukti tulisan; (b) Bukti dengan saksi; (c) Persangkaan; (d) Pengakuan; (e)Sumpah.

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta.⁴⁷

Mengingat dalam hukum persaingan usaha memiliki aturan tersendiri yaitu UU Antimonopoli, tentu saja memiliki alat bukti yang berbeda. Dalam

⁴⁵ Detivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Ibid.* Hal 46

⁴⁶ Knud Hansen, et all, *op. Cit.* Hal. 395

⁴⁷ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 556-557

rangka pembuktian praktik penetapan harga, KPPU sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, berupaya memperoleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan UU Antimonopoli, apabila adanya dugaan pelanggaran. Hal tersebut termuat dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 jo Pasal 72 Peraturan KPPU No. 1/2010 yang terdiri dari : (1)Keterangan Saksi; (2)Keterangan Ahli; (3)Surat dan/atau dokumen; (4)Petunjuk; dan (5)Keterangan pelaku usaha.

a. Alat bukti ditinjau dari sifatnya

Apabila ditinjau dari sifatnya, alat bukti terbagi menjadi 2 (dua) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bukti Langsung (*Hard evidence*) adalah bukti yang diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: *fax*, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya.
2. Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial evidence*) adalah suatu bentuk bukti yang secara tidak langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa: (i) bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan (ii) bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan

menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.⁴⁸

b. Bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus persaingan usaha

Dalam melaksanakan penegakan untuk UU No. 5/1999 KPPU lebih menitikberatkan penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang mana di atur dalam Pasal 42 UU Antimonopoli jo. Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1/2010 yang menjelaskan adanya bukti petunjuk sebagai pembuktian perkara penetapan harga ini. Dalam Rancangan Undang-undang Antimonopoli sedang dalam pembahasan oleh DPR, bahwa dalam RUU tersebut bukti petunjuk diterangkan lebih jelas dalam Pasal 72 ayat (2) RUU Antimonopoli dalam penjelasannya, yaitu: “Alat bukti petunjuk antara lain alat bukti ekonomi (*economic evidence*) dan alat bukti komunikasi (*communication evidence*)”.

Sebagai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian kasus penetapan harga, *circumstantial evidence* memiliki 2 jenis alat bukti, yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang menggambarkan ucapan suatu perjanjian atau para pihaknya, data-data terkait tindakan pelaku usaha dari segi ilmu ekonomi namun dapat menunjukkan bahwa terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat melalui fakta-fakta tersebut. Adapun pengertian

⁴⁸ Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) UU No. 5 Tahun 1999, Hal. 16

dari masing-masing bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus persaingan usaha:

1. Bukti Komunikasi

One type is evidence that cartel operators met otherwise communicated, but does not describe the substance of their communications. It can be called “communications” evidence; (salah satu jenis bukti bahwa operator-operator kartel bertemu melalui komunikasi, namun tidak menggambarkan substansi dari komunikasi mereka. Hal ini dapat disebut sebagai bukti “komunikasi”)⁴⁹

2. Bukti Ekonomi

The economic evidence, whereby there are two types of economic evidence, which are: evidence of conduct by firms in a market and of the industry as a whole as well “structural” evidence; (bukti ekonomi, dimana ada dua jenis bukti ekonomi yaitu: bukti dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan di suatu pasar dan industri secara keseluruhan sebagaimana halnya bukti “struktural”)⁵⁰

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pembuktian terjadinya perilaku/strategi yang paralel (*parallel business conduct*) bukan merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian penetapan harga. Masih dibutuhkan analisis tambahan (*plus factors*) untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal agreement*, seperti rasionalitas penetapan harga,

⁴⁹ *The Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD), Prescuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement* (policy grief, June 2007, p. 1-3), dalam M Udin Silalahi Dian Parluhutan, hal. 43, I Made Sarjana, *op. Cit. Hal.* 69

⁵⁰ I Made Sarjana, *Ibid* hal 69

analisis struktur pasar, analisis data kinerja, analisis penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating devices*). Namun, dalam upaya pembuktian, tidak seluruh alat analisis tambahan tersebut harus digunakan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pembuktian terbaik adalah pembuktian dengan menggunakan baik bukti langsung maupun bukti tidak langsung. Namun, apabila sulit mendapatkan bukti langsung seharusnya digunakan bukti tidak langsung yang terbaik, yakni dengan mengkombinasikan bukti komunikasi dengan bukti ekonomi.⁵¹

D. Tinjauan Tentang Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Banding

1. Tinjauan Tentang Putusan KPPU

a. Pembacaan Putusan

Menurut Knud Hansen dalam buku Andi Fahmi Lubis *et. al.* Pasal 43 ayat (3) UU Antimonopoli mensyaratkan setelah 30 hari pemeriksaan maka KPPU wajib memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran ataupun tidak. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang kurangnya 3 orang anggota Komisi.

Putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) UU No 5 Tahun 1999). Berdasarkan penjelasan Pasal

⁵¹ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, 2017, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, KPPU, Jakarta, Hal. 95

43 ayat (4) UU ini yang dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

UU No.5/1999 tidak menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha (*in person*) atau dapat dilakukan dengan metode lain. Dengan berpegang pada asas efisiensi serta keterbukaan, maka pada dasarnya Komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Dengan mengingat pada pendeknya waktu (yakni 14 hari) yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi, maka selayaknyalah pemberitahuan putusan tidak harus dilakukan dengan *in person* melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi yang modern seperti e-mail atau fax.⁵²

b. Pelaksanaan Putusan KPPU

1. Tanggapan pelaku usaha terhadap putusan KPPU

- a. Pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh UU untuk mengajukan keberatan (Pasal 44 ayat 2). Selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU,

⁵² Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 329-330

pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 46 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999) dan terhadap putusan tersebut, dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999).

- b. Pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri. Dalam hal ini pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut (Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999).
- c. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (Pasal 44 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999).⁵³

⁵³ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 330

2. Putusan KPPU memerlukan Fiat Eksekusi

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap UU No 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari PN. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua PN.

Fiat eksekusi dalam hal ini dapat diartikan persetujuan PN untuk dapat dilaksanakannya putusan KPPU. Persetujuan ini tentu tidak akan diberikan apabila Ketua PN menganggap KPPU telah salah dalam memeriksa perkara tersebut. Dengan demikian maka mekanisme fiat eksekusi ini dapat menjadi kontrol terhadap putusan putusan yang dihasilkan oleh KPPU yang tidak diajukan upaya keberatan oleh pihak pelaku usaha.⁵⁴

c. Upaya hukum oleh pelaku usaha

Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan Komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi (Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999). Upaya hukum tersebut diajukan ke PN tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha (Pasal 1 angka (19) UU No. 5 Tahun 1999).

⁵⁴ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 331

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasal 45 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PN, maka PN wajib memberikan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan (Pasal 45 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999).

Pengajuan Keberatan merupakan upaya hukum baru yang diperkenalkan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Sebelumnya, hukum acara di Indonesia hanya mengenal 2 jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali.⁵⁵

2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Banding

a. Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 19 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, semua putusan pengadilan pertama dapat dimintakan banding. Pasal tersebut memperkenalkan adanya instansi pengadilan tingkat banding. Selanjutnya Pasal 6 UU No. 2 tahun 1986 mengatur, yang bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi, yang berkedudukan di ibukota provinsi (Pasal 4 (2). Kekuasaan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding menurut Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986, bertugas dan

⁵⁵ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 331-332

berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan PN dalam tingkat pertama. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan PT sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan PN apabila terhadap putusan ini dimintakan banding oleh pihak yang berperkara.⁵⁶

b. Kedudukan dalam memeriksa perkara keberatan

Tugas PN dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan KPPU, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan PN dalam hal ini menyerupai kedudukan Pengadilan Tinggi (PT) dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.

Oleh karena itu, pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dapat dikatakan seolah olah sebagai pemeriksaan banding karena menurut Perma No 3 Tahun 2005 :

- a. Pasal 5 ayat (4) “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.
- b. Pasal 6 ayat (1) “Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan”.⁵⁷

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.* Hal 190

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 337

c. Pemeriksaan tambahan

Pemeriksaan tambahan diatur dalam Bab IV Perma No 3 Tahun 2005. Majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan mempunyai wewenang untuk menentukan perlu tidaknya diadakan pemeriksaan tambahan. Apabila dipandang perlu, maka KPPU diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Perintah tersebut harus memuat alasan mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan, hal-hal apa saja yang harus diperiksa serta waktu yang diperlukan mengingat adanya time frame yang ketat dalam penyelesaian perkara keberatan.

Pemeriksaan tambahan dilakukan hanya untuk bukti bukti yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus oleh KPPU. Namun apabila majelis hakim merasa kurang jelas, sehingga menganggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan maka KPPU akan melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang harus diperiksa oleh KPPU.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan oleh hakim ditangguhkan. Setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan, maka sidang pemeriksaan keberatan dilanjutkan selambat lambatnya tujuh hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

Walaupun sudah diatur dalam Perma No 3 Tahun 2005, dalam praktek pemeriksaan tambahan ini seringkali menemui kesulitan karena Perma tersebut tidak mengatur bagaimana bila terdapat bukti baru dan saksi baru yang diajukan oleh pemohon.

Selain itu, Perma 3 Tahun 2005 juga tidak mengatur secara detail berapa lama waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini dapat berakibat timbulnya ketidak pastian tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara.⁵⁸

d. Putusan Pengadilan terhadap upaya keberatan

1) Memperkuat putusan KPPU

Pengadilan negeri berpendapat bahwa Majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya sehingga majelis hakim PN sependapat dengan putusan Majelis KPPU. Putusan PN yang memperkuat putusan Majelis KPPU tidak merubah terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU.

2) Membatalkan putusan KPPU

Apabila PN berpendapat bahwa Majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara, atau pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/1999 maka PN dapat membatalkan putusan majelis Komisi. Dalam hal ini maka putusan Majelis KPPU dianggap tidak pernah ada.

3) Membuat putusan sendiri

Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan PN dapat berupa memperkuat sebagian putusan majelis KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan.⁵⁹

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 338

⁵⁹ Andi Fahmi Lubis, *et.al. Op.cit.* Hal 339

4) Pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU

Pada tahun 2003, terjadi perubahan yang cukup fundamental terkait dengan hukum acara dalam perkara atas upaya keberatan Terlapor terhadap putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di lembaga peradilan umum.

Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU. Secara garis besar PERMA Nomor 01 Tahun 2003 tersebut berisi sebagai berikut:

1. Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.
2. KPPU merupakan pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di dalam proses upaya keberatan di lembaga peradilan, KPPU dijadikan pihak yang berperkara sehingga kedudukannya dianggap sejajar dengan pihak Terlapor.
3. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut UU Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara Tata Usaha Negara (TUN) sehingga tidak dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dan KPPU. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.
5. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN memeriksa keberatan tersebut dan jangka waktu pemeriksaannya dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh PN lain yang tidak ditunjuk oleh MA. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang diajukan apabila terdapat beberapa Terlapor dengan kedudukan hukum yang berbeda.
6. KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat upaya keberatan atas Putusan KPPU maka KPPU harus menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.
7. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan dan berkas perkara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkup pemeriksaan atas upaya keberatan hanya pada Putusan KPPU dan berkas perkaranya.

8. Adanya mekanisme pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang dilakukan KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan apabila Majelis Hakim menganggap perlu.
9. Pengajuan penetapan eksekusi untuk perkara yang diajukan keberatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, sedangkan atas perkara yang tidak dilakukan melalui proses keberatan maka diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha (Terlapor).⁶⁰
- e. Putusan Pengadilan ditinjau dari sifatnya dapat berupa:
- 1) Putusan declaratoir
Putusan PN semacam ini menetapkan suatu keadaan misalnya pembatalan perjanjian. Bila PN menyatakan perjanjian yang dibuat pelaku usaha batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun untuk mengeksekusi putusan.
 - 2) Putusan condemnatoir
Putusan PN ini menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi.

⁶⁰ <http://www.kppu.go.id/id/produk-hukum/perma/> , Tanggal akses: 2 Maret 2018

Tabel 1

SISTEM PERADILAN PIDANA, PERDATA dan KPPU

No.	Tahapan	Pidana	Perdata	KPPU
1.	Sumber laporan dan dasar hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan: pemberitahuan yang disampaikan oleh karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana - Pengaduan: pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. - Sumber: Pasal 1 No. 24 dan 25 KUHAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan: Tuntutan perdata (<i>burgerlijke vordering</i>) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. - Surat gugatan telah dibuat dan telah memenuhi syarat formal (lihat Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 Rbg, Zegelverordening 1921), maka surat gugatan tersebut haruslah didaftarkan ke Panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang ingin dituju untuk mendapatkan nomor perkara dan oleh panitera kemudian akan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan atas dasar laporan: pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. - Pemeriksaan atas dasar inisiatif: pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999.
2.	Proses setelah menerima laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelidikan: serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan - Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU KUHAP ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. - Penuntutan: tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan diibantu oleh mediator. Mediator ini adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator ini bisa dari Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan bisa juga dari pihak luar yang sudah memiliki sertifikat mediator. - Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan diibantu oleh mediator. Mediator ini adalah 	<p>Proses setelah menerima laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelidikan: serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Sekretariat Komisi untuk mendapatkan data dan informasi di lokasi atau tempat tertentu terkait dengan dugaan pelanggaran. - Pemberkasan: serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran.

No.	Tahapan	Pidana	Perdata	KPPU
			pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator ini bisa dari Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan bisa juga dari pihak luar yang sudah memiliki sertifikat mediator.	
3.	Poses di persidangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadili: serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembacaan surat gugatan, termasuk jawaban, Replik, Duplik - Replik: merupakan penegasan dalil-dalil Penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. - Duplik: penegasan dari bantahan/jawaban tergugat setelah adanya <i>replik</i> dari penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab menjawab ini sampai kepada <i>duplik</i> akan menjadi teranglah apa sebenarnya yang menjadi pokok sengketa antara pihak penggugat dan tergugat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan: serangkaian kegiatan yang dilakukan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah. - Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. - Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.
4.	Putusan pengadilan/Komisi dan sanksi hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. - Sanksi pidana: <ul style="list-style-type: none"> Hukuman pokok: hukuman mati, penjara, kurungan, denda. Hukuman tambahan: hukuman pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan <i>condemnatoir</i> yakni putusan yang bersifat menghukum pihak pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasinya (kewajibannya). - Putusan <i>declaratoir</i> yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. - putusan konstitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum 	<p>Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), - pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau

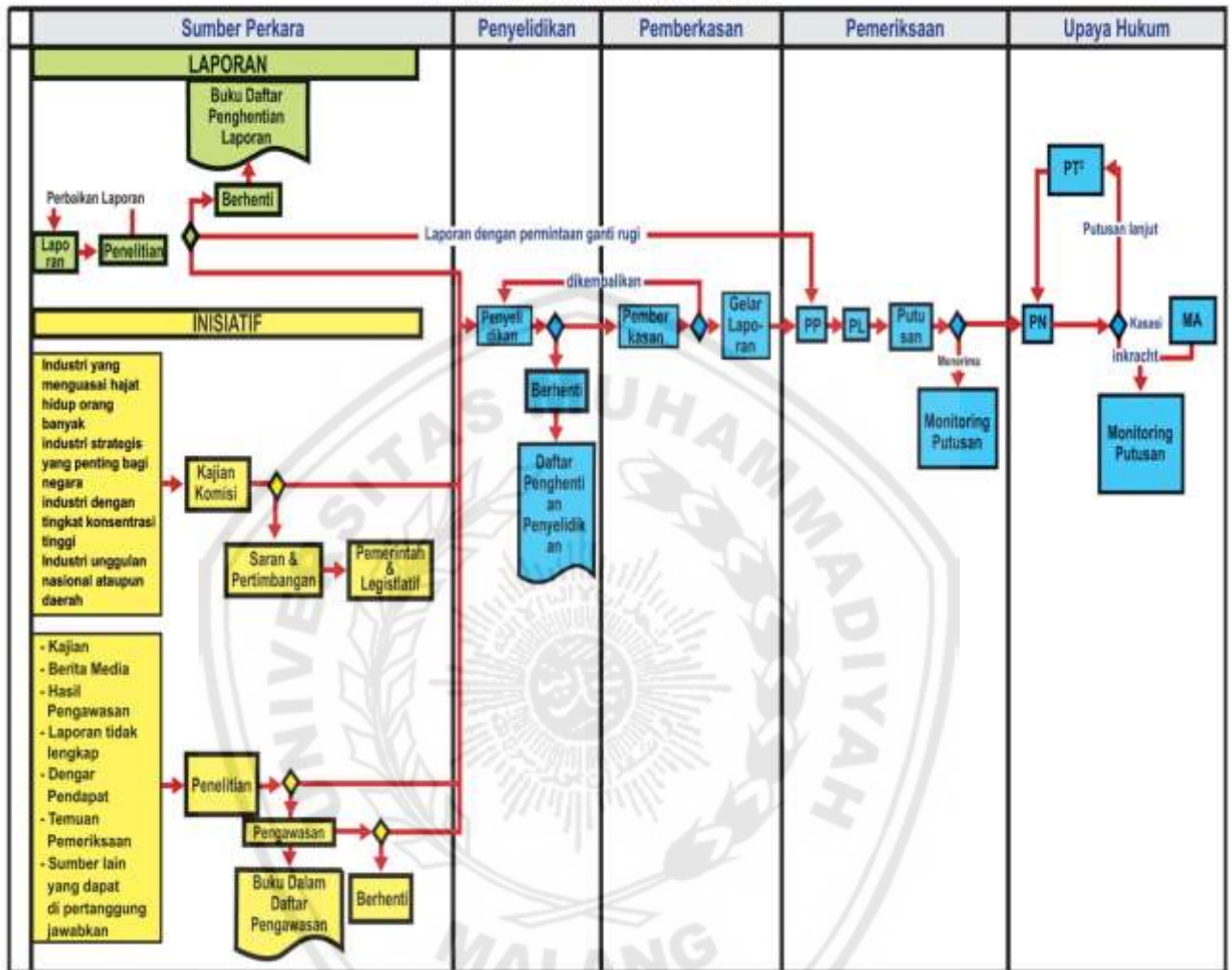
No.	Tahapan	Pidana	Perdata	KPPU
		hakim	baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.	izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), - penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008), - tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)
5.	Upaya hukum keberatan pada putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada sistem peradilan pidana, perdata dan KPPU	<p>-Banding Hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan tingkat pertama, kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan cara cepat Dasar hukum banding: (1) Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Pasal 67 dan Pasal 233 s.d 243 KUHP; (3) SEJA No. SE-014/JA/8/1982 tentang Upaya Hukum Biasa; (4) KEPJA No. KEP-518/JA/11/1999 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana; (5) INSJA No. INS-006/JA/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pidana Umum</p> <p>-Kasasi Hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat banding (PT), kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan cara cepat, dengan mengajukan kepada Mahkamah Agung melalui PT yang bersangkutan</p>	<p>-Banding Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri/ putusan tingkat pertama Dasar hukum banding: (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan.</p> <p>-Kasasi Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir (MA). Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Dasar hukum kasasi: Pasal 25 dan 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004</p> <p>-Peninjauan Kembali (PK)/ <i>request civil</i> Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembalikepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana dan perdata oleh pihak yang</p>	<p>-Pengajuan keberatan Pengajuan keberatan merupakan upaya hukum baru yang diperkenalkan oleh UU No. 5 tahun 1999. Sebelumnya, hukum acara di Indonesia hanya mengenal 2 jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali Ketentuan khusus yang mengatur keberatan terdapat dalam PERMA No. 1 tahun 2003 yang mendefinisikan keberatan sebagai upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Pasal 2 (1) PERMA No. 3 tahun 2005 menyatakan keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha terlapor Dasar hukum : - PERMA No. 1 tahun 2003 - PERMA No. 3 tahun 2005</p> <p>Pada perkara KPPU. untuk proses dan pelaksanaan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sama dengan perkara Pidana dan Perdata</p>

No.	Tahapan	Pidana	Perdata	KPPU
		<p>Tata cara diatur dalam Pasal 1 butir 12 jo Pasal 67 jo Pasal 244 s.d 258 KUHAP</p> <p>Dasar Hukum kasasi: (1) Pasal 22 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Pasal 30 dan 45A UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (3) Pasal 244 s.d 1258 KUHAP</p> <p>-Peninjauan Kembali (PK) Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang kedua setelah Kasasi demi kepentingan hukum. Peninjauan Kembali adalah hak terpidana/ahli warisnya ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Negeri terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>Dasar hukum PK: (1) Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Pasal 66, 73 s.d 76 UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 5 tahun 2004; (3) Pasal 263 s.d 269 KUHAP; (4)INSJA No. 006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pidum.</p>	<p>berkepentingan</p> <p>Dasar hukum PK: Pasal 66-77 UU No. 14/1985 jo UU No. 5/2004</p> <p>Alasan-alasan PK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya 5. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. 	<p>pada umumnya.</p>

Sumber : KUHAP, KUHAPdt dan Pedoman KPPU

Bagan 1
Alur berpekara di KPPU

TATA CARA PENANGANAN PERKARA



Sumber: <http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/skema/>